

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR (PIP) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA**

Cindiana Putri¹ Thalita Rifda Khaerani²

eJournal Administrasi Publik

Volume 9, Nomor 2, 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pengarang : Cindiana Putri

NIM : 1702015025

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Samarinda, 2 Oktober 2021

Pembimbing,

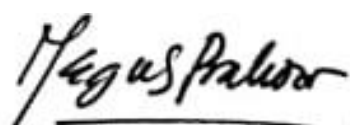


Thalita Rifda Kaherani, S.AP., M.Si
NIP. 20181019 890922 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 2	<u>Dr. Chatas Teguh Prakoso, M.Si</u>
Tahun : 2021	NIP.19741120 2000501 1 001
Halaman : 5173-5185	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Cindiana Putri¹, Thalita Rifda Khaerani²

Abstrak

Cindiana Putri, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda" dengan bimbingan Ibu Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si sebagai dosen pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi dan mendeskripsikan faktor penghambat kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan PIP dengan sub fokus mekanisme pengusulan dan penetapan serta pemantauan PIP dan faktor penghambat pelaksanaan PIP. Sumber data primer dari key informan yaitu staf tim pokja PIP, Kepala dan staf Seksi Kelembagaan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kepala dan Staf SDN 003 dan SDN 024 Samarinda Utara serta informan yaitu staf BPKP RI Kaltim, staf BPK RI Kaltim, staf BRI KC Kota Samarinda, orang tua peserta didik SDN 003 dan SDN 024 Samarinda Utara. Data sekunder yaitu dokumen, gambar, dan diagram. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi, penyajian data dan kesimpulan.

Kesimpulan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Pada mekanisme pengusulan dan penetapan PIP telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP tetapi proses pengusulan nama yang belum maksimal karena pihak sekolah menyamaratakan pengusulan peserta didik sehingga tidak mengutamakan penerima sesuai prioritas. Mengenai 4 aspek pemantauan yaitu Ketepatan sasaran penerima PIP bahwa pihak sekolah belum maksimal melakukan pendataan peserta didik pemilik KIP, Ketepatan jumlah dana sebesar Rp225.000 atau Rp450.000 telah sesuai dengan SK, Ketepatan waktu penyaluran dana dalam 1 tahun 1 kali, dan kesesuaian penggunaan dana telah digunakan untuk kebutuhan sekolah tetapi sisa dana untuk kebutuhan diluar sekolah. Faktor penghambat PIP yaitu faktor komunikasi yang belum berjalan baik antara pihak sekolah dengan peserta didik, kurangnya informasi dari pusat mengenai batas akhir aktivasi rekening penerima dan proses pemantauan kurang optimal dalam penggunaan dana.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Program Indonesia Pintar (PIP)

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar dapat memperluas wawasan dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia maka pemerintah menerapkan kebijakan di bidang pendidikan untuk mendorong pembangunan pendidikan sesuai dengan tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Disisi lain terdapat hal yang menghambat pelaksanaan pendidikan terutama bagi kelompok keluarga miskin karena tingginya biaya pendidikan menyebabkan adanya angka putus sekolah anak di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah menerapkan kebijakan sebagai upaya meringankan biaya pendidikan masyarakat dan mengurangi angka putus sekolah anak.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan uang tunai yang disalurkan bagi peserta didik dari kalangan keluarga miskin atau rentan miskin untuk memperoleh kesempatan belajar dan membiayai pendidikan. PIP disalurkan sejak tahun 2015 masih berjalan hingga sekarang tahun 2021. PIP bertujuan untuk menambah akses belajar bagi anak usia 6-21 tahun untuk dapat meningkatkan akses belajar peserta didik mengemban pendidikan yang layak, mengurangi angka putus sekolah dan merangkul peserta didik melanjutkan sekolah. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi salah satunya rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana sesuai dengan tujuan PIP serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PIP. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kebijakan PIP.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Sekolah Dasar yaitu pada SDN 003 dan SDN 024 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Pada kedua sekolah tersebut merupakan sekolah dengan penerima bantuan PIP terbanyak di Kecamatan Samarinda Utara. Selain itu terdapat beberapa permasalahan mengenai kurang informasi waktu penyaluran dana PIP, pihak sekolah kesulitan melakukan pemantauan penggunaan dana dan proses pengusulan belum tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis paparkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
 - b. Dapat meningkatkan kajian ilmu Administrasi Publik tentang implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pelaksana, menjadi gambaran dan bahan evaluasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan selama berjalannya PIP sehingga dapat meningkatkan sumber daya lebih optimal.
 - b. Bagi penulis, memperluas pengetahuan mengenai ilmu kebijakan publik dan implementasi kebijakan PIP.
 - c. Bagi penerima bantuan, dapat mengetahui pemanfaatan dana dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan dengan digunakan sebagai referensi serta menghindari pengulangan kajian yang sama pada penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Lidia Lusiana (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum optimal karena sosialisasi yang kurang maksimal. Faktor pendukung yaitu kerjasama yang baik dan sarana pendukung yang lengkap sedangkan faktor penghambat yaitu penerima PIP kurang tepat sasaran dan tidak ada panduan sebagai pedoman PIP.

2. Penelitian Lilis Novia Saraswati (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP belum berjalan maksimal karena terdapat faktor penghambat yaitu belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam menentukan prioritas penerima, data masih kurang akurat, waktu pencairan dana yang terlambat, sosialisasi kurang optimal, lamanya waktu verifikasi KIP serta rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukkan PIP.
3. Penelitian Putri Monika (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP sudah berjalan dengan baik ditandai dengan proses pelaksanaan sesuai SOP.

Teori dan Konsep

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena (Kerlinger dalam Noorlaila, 2020:27). Teori dapat berfungsi sebagai alat analisis dalam mengelola data agar lebih akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dilaksanakan oleh sekelompok orang yang saling berhubungan menyelesaikan permasalahan yang diterapkan (Anderson dalam Agustino, 2014:7). Sedangkan pendapat lain, kebijakan publik adalah keputusan yang saling berkaitan antara satu keputusan dengan yang lainnya yang diambil oleh sekelompok politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dalam mencapai tujuan (Jenkins dalam Syahrani, 2015:2). Berdasarkan pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan seluruh rangkaian pelaksanaan oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik menggunakan tahapan terbaik dengan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pada kebijakan publik terdapat tahapan yang dilalui agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berikut pendapat William Dunn mengenai tahapan kebijakan publik yaitu sebagai berikut (Dunn, 2003:24-25):

1. Penyusunan agenda dapat berupa perumusan masalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul kemudian dapat menerima informasi mengenai isu-isu yang menimbulkan permasalahan.
2. Formulasi kebijakan berupa tahapan peramalan yang memberikan informasi mengenai konsekuensi pada masa yang akan datang jika diterapkan atau tidak diterapkannya beberapa alternatif kebijakan tersebut.
3. Rekomendasi kebijakan dalam kebijakan dapat berupa informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari alternatif kebijakan yang dipilih dengan memperhatikan manfaat yang paling besar diperoleh.
4. Implementasi kebijakan dilakukan dengan monitoring berupa tindakan kebijakan dengan memberikan informasi mengenai konsekuensi pada waktu sekarang dan masa lalu setelah diterapkannya kebijakan tersebut.

5. Evaluasi kebijakan merupakan proses yang mencakup seluruh kebijakan dengan mengukur seberapa besar keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan dapat memberikan perubahan positif bagi semua pihak.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah serangkaian tindakan setelah suatu kebijakan ditetapkan menghubungkan kebijakan dengan hasil yang diharapkan (Syahrani, 2015:88-89). Sedangkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses mengubah perencanaan kedalam suatu tindakan nyata (Wijaya dan Supardo dalam Pasolong, 2013:57). Maka dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan sistematis pada proses kebijakan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan.

Terdapat dua pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan dari atas ke bawah yang memiliki tujuan sebagai penentu kebijakan yang akan diuji dengan mempelajari tujuan dan prosedur implementasi kebijakan hingga pada proses hasil kebijakan. Sedangkan pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan dari bawah ke atas yang digunakan untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan semua pihak dari berbagai tingkatan.

Pada implementasi kebijakan terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mengukur keberhasilan berjalannya kebijakan tersebut. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan teori menurut para ahli sebagai berikut (Subarsono, 2005:89-100):

1. Teori George C. Edward III mengemukakan terdapat empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi
2. Teori Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Komunikasi antar organisasi
 - d. Karakteristik agen pelaksana
 - e. Kondisi sosial ekonomi dan politik
 - f. Disposisi pelaksana
3. Teori A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan faktor implementasi kebijakan yaitu, karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan

Program Indonesia Pintar (PIP)

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar adalah bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar

dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan kepada anak usia 6-21 tahun dengan kriteria tertentu.

Penerima PIP diprioritaskan kepada anak usia 6 sampai 21 tahun berdasarkan skala prioritas yaitu peserta didik dari keluarga pemegang KIP yang merupakan hasil pemadnan terkini antara peserta didik yang terdaftar di Dapodik dan DTKS dan peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan suatu proses tindakan yang strategis dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan dana untuk mengurangi angka putus sekolah anak yang tidak mampu membiayai pendidikan terutama bagi anak usia 6-21 tahun berasal dari keluarga miskin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia suatu objek atau sistem pada masa sekarang (Nasir dalam Rukajat, 2018:1). Penelitian dilakukan untuk meneliti suatu objek fenomena secara alamiah dengan mengumpulkan data berupa kalimat sehingga menghasilkan gambaran berupa suatu kesimpulan yang bermanfaat secara berkelanjutan.

Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu: Implementasi Kebijakan PIP penulis membagi menjadi 2 sub fokus yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan PIP terbagi menjadi 2 sub fokus yaitu:
 - a. Mekanisme pengusulan dan penetapan PIP
 - b. Pemantauan pelaksanaan PIP dengan memperhatikan 4 aspek yaitu ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah dana, ketepatan waktu penyaluran dan kesesuaian penggunaan dana PIP.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan PIP pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari sumber utamanya. Key informan yaitu Staf Puslapdik Tim Pokja PIP SD, Kepala Seksi dan Staf Kelembagaan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kepala Sekolah dan staf operator PIP di SDN 003 dan SDN 024 Samarinda Utara.

Sedangkan informan yaitu staf BPKP, staf BPK, staf BRI, orang tua peserta didik SDN 003 dan SDN 024 Samarinda Utara.

2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung sebagai penunjang dari sumber pertama berupa dokumen-dokumen, Surat Keputusan, laporan dan data serta buku maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menerapkan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sesuai standar yang diterapkan yaitu observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sosial, wawancara dengan mengungkap permasalahan yang diteliti secara detail dan dokumentasi kumpulan data berupa gambar, surat, dokumen yang menjadi hal pendukung (Sugiyono, 2020:104).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang telah diperoleh akan dijabarkan dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan teknik model interaktif oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan (Sugiyono, 2007:431-438).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pada implementasi kebijakan PIP berkaitan dengan teori menurut George C. Edward III serta dengan penelitian terdahulu berdasarkan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berdasarkan hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan hal penting terhadap implementasi kebijakan untuk memperlancar berjalannya kebijakan sesuai dengan peraturan. Komunikasi yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan yaitu *pertama* komunikasi antara pihak sekolah dengan peserta didik, *kedua* komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah, *ketiga* komunikasi antara pihak Puslapdik dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
2. Sumber daya pada implementasi kebijakan yang mampu menjalankan kebijakan dengan maksimal. Pada sumber daya manusia tersedianya pihak pelaksana yaitu Tim POKJA PIP SD pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kasi Kelembagaan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Samarinda serta staf operator SIPINTAR, Kepala Sekolah dan staf operator PIP SDN 003 Samarinda Utara, Kepala Sekolah dan staf operator PIP SDN 024 Samarinda Utara dan lembaga penyalur BRI Cabang Kota Samarinda.
3. Disposisi adalah sikap pada seorang implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas sesuai tujuan. Disposisi pada BRI juga dapat dilihat dari komitmen petugas bank dalam melayani proses

penyaluran dana PIP kepada penerima. Pihak Puslapdik melakukan perjanjian kerjasama dengan BRI sebagai bank penyalur pada jenjang SD dan SMP.

4. Struktur birokrasi merupakan bagian yang memiliki pengaruh paling besar pada implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pelaksana yang terlibat yaitu, pemerintah pusat (Puslapdik), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan, dan lembaga penyalur.

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan PIP

Mengenai mekanisme pelaksanaan PIP tertuang pada Persesjen Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Persesjen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa terdapat 3 tahapan dalam menentukan penerima PIP yaitu tahapan pengusulan, pengolahan data dan penetapan penerima bantuan PIP. Mengenai alur mekanisme pengusulan dan penetapan PIP terbagi menjadi 2 bagian yaitu pengusulan berdasarkan data usulan Dinas Pendidikan Kota dan pengusulan melalui pemadanan data DTKS dan Dapodik, dijabarkan sebagai berikut:

1. *Pertama*, pengusulan berdasarkan usulan Dinas Pendidikan dilakukan dengan proses pengusulan pihak sekolah melakukan pendataan peserta didik sesuai dengan prioritas melalui aplikasi Dapodik lalu diteruskan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota untuk diverifikasi. Setelah data usulan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota lalu diteruskan kepada Puslapdik melalui aplikasi SIPINTAR untuk dilakukan validasi ulang data sehingga ditetapkan penerima melalui SK Nominasi dan SK Pemberian PIP, kemudian pihak Puslapdik mengirimkan SK ke Dinas Pendidikan Kota untuk diteruskan ke penerima melalui perantara sekolah.
2. *Kedua*, pengusulan berdasarkan pemadanan data DTKS dengan Dapodik dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi kemudian data dilakukan verifikasi dan validasi oleh Puslapdik lalu di tetapkan melalui SK.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pengusulan dan penetapan PIP di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda bahwa telah sesuai dengan peraturan, tetapi pada proses pengusulan calon penerima PIP harus lebih selektif sehingga lebih tepat sasaran. Bagi pihak sekolah harus lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan peserta didik dalam proses pengusulan agar lebih taat peraturan sehingga dapat memperlancar pendataan peserta didik yang sesuai dengan kriteria penerima PIP.

Pemantauan PIP

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Persesjen Nomor 3 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan PIP Bab IV Pemantauan dan Pengaduan. Pemantauan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemantauan internal dan pemantauan eksternal. Pemantauan internal yang terlibat yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan. Sedangkan pemantauan eksternal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemantauan pelaksanaan PIP bahwa pemantauan eksternal belum dilakukan dengan maksimal karena pada dua lembaga BPK dan BPKP tidak memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pada kebijakan PIP. Mengenai pemantauan internal telah dilakukan dengan beberapa bentuk pelaksanaan yaitu:

1. Proses pemantauan oleh Puslapdik dilakukan dengan memantau hasil rekap data dari proses pengusulan hingga perkembangan penyaluran dana PIP per-tahun setiap jenjang pendidikan melalui aplikasi SIPINTAR, melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan maupun bank penyalur untuk melakukan monitoring langsung di lapangan khususnya bagi daerah yang kondisinya sulit mengakses ke bank penyalur.
2. Pemantauan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda melakukan pengawasan PIP secara tidak langsung melalui aplikasi Dapodik dan SIPINTAR. Dengan tujuan memantau rekapan data hasil pengusulan, penyaluran hingga pencairan dana PIP.
3. Pemantauan oleh SDN 003 Samarinda Utara melakukan pengawasan PIP secara langsung di sekolah. Bentuk pemantauan yang dilakukan dengan meminta kepada penerima mengumpulkan nota pembelian sebagai bukti dana telah digunakan sesuai tujuan. Tetapi selama masa pandemic covid-19 ini pengawasan menjadi kurang maksimal dilakukan.
4. Pemantauan oleh SDN 024 Samarinda Utara melakukan pengawasan PIP secara langsung menanyakan kepada perwakilan penerima mengenai penggunaan dana yang telah diberikan dipergunakan untuk apa saja. Pemantauan tidak dapat dilaksanakan dengan rutin karena kegiatan belajar secara daring.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemantauan PIP dilakukan dengan mengacu pada 4 (empat) aspek pemantuan yang terdiri atas ketepatan sasaran penerima PIP, ketepatan jumlah dana PIP, ketepatan waktu penyaluran dana PIP dan kesesuaian penggunaan dana PIP dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Penerima Dana PIP

Berdasarkan Persesjen Nomor 7 Tahun Tahun 2021 Perubahan Atas Persesjen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP bahwa prioritas penerima PIP dengan ketentuan tertentu yaitu:

- a. Peserta didik pemegang KIP
- b. Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin
- c. Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu
- d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, putus sekolah atau yang mengalami kelainan fisik

Berdasarkan hasil penelitian bahwa program ini telah tepat sasaran tetapi belum maksimal tersalurkan kepada prioritas utama PIP dikarenakan pihak sekolah tidak melakukan pendataan peserta didik yang memiliki KIP. Selain itu pihak sekolah juga menyamaratakan seluruh peserta didik diusulkan sebagai calon penerima PI, sehingga masih terdapat penerima PIP

yang orang tuanya bekerja sebagai PNS dan disisi lain peserta didik yang berasal dari keluarga miskin tidak menerima bantuan tersebut.

2. Ketepatan Jumlah Dana PIP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dana yang telah disalurkan sejak tahun 2015-2020 telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP pada jenjang Sekolah Dasar dana yang diberikan kepada penerima kelas 1,2,3,4,5 sebesar Rp225.000/peserta didik dan bagi kelas akhir 6 sebesar Rp450.000/peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat mengharapkan ditahun selanjutnya terdapat peningkatan dana agar lebih menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap tahunnya yang mengalami peningkatan.

3. Ketepatan Waktu Penyaluran PIP

Berdasarkan Persesjen Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Persesjen Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP mengenai waktu penyaluran dilakukan setiap tahun pelajaran semester genap dan semester gasal. Dana PIP disalurkan langsung kepada peserta didik melalui rekening SimPel di bank penyalur. Berdasarkan hasil penelitian mengenai waktu penyaluran dana PIP disalurkan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Untuk waktu penyaluran dibagi menjadi beberapa tahapan tergantung dari SK pusat.

4. Kesesuaian Penggunaan Dana PIP

Tujuan penggunaan dana PIP adalah untuk membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian sekolah, membiayai transportasi, uang saku, atau biaya les. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai ketepatan penggunaan dana PIP telah digunakan sebagai berikut:

- a. Puslapdik terkait dengan pemantauan penggunaan dana memang sulit dilakukan karena dana langsung disalurkan ke rekening pribadi penerima. Sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa terdapat penyalahgunaan dana diluar kebutuhan sekolah yang tidak sesuai dengan tujuan PIP.
- b. Pihak Dinas Pendidikan Kota Samarinda hanya melakukan pemantauan melalui aplikasi SIPINTAR dan komunikasi via whatsapp. Selain itu operator PIP pada Dinas Pendidikan sebagai jalur koordinasi antara pihak sekolah dengan pemerintah pusat.
- c. Bentuk pemantauan oleh pihak SDN 003 Samarinda Utara bahwa pihak sekolah melakukan pemantuan dengan miminta kepada orang tua penerima agar mengumpulkan nota pembelanjaan ke sekolah agar lebih transparan. Tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik karena komunikasi yang kurang baik antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik.
- d. Bentuk pemantauan oleh pihak SDN 024 Samarinda Utara dengan menanyakan langsung kepada perwakilan penerima PIP apakah dana telah dipergunakan sesuai kebutuhan. Tetapi pihak sekolah tidak melakukan pemantaun secara rutin tetapi hanya beberapa kali saja dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan.

- e. Bentuk penggunaan dana oleh penerima PIP, berdasarkan hasil wawancara bahwa orang tua penerima PIP telah memanfaatkan dana dengan membeli keperluan sekolah berupa alat tulis, buku dan perlengkapan sekolah. Tetapi sebagian dana tidak digunakan untuk kebutuhan sekolah tetapi juga untuk membeli beras.

Faktor Penghambat Pelaksanaan PIP

Secara keseluruhan implementasi kebijakan PIP jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam proses pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kebijakan PIP meskipun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PIP. Dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan PIP sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak sekolah dengan peserta didik. Karena kondisi pandemic covid-19 yang menjadi penghambat komunikasi secara langsung sehingga pihak sekolah kurang aktif melakukan sosialisasi. Selain itu pihak sekolah juga kurang melakukan pendataan peserta didik yang memiliki KIP sebagai prioritas penerima PIP.
2. Kurangnya informasi dari pusat mengenai waktu penyaluran dana yang bertahap tidak menentu serta informasi yang kurang mengenai batas akhir aktivasi rekening peserta didik, sehingga terdapat dana yang tidak dicairkan oleh penerima akan dikembalikan ke kas negara.
3. Proses pemantauan kurang optimal karena pihak sekolah kesulitan mengumpulkan bukti penggunaan dana berupa nota pembelian dan scan buku rekening sebagai bukti telah mencairkan dana dan telah menggunakan dana sesuai tujuan PIP.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada implementasi kebijakan PIP pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Pada mekanisme pengusulan dan penetapan penerima PIP sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan pelaksanaan PIP. Tetapi pihak sekolah belum melakukan pendataan peserta didik sesuai dengan prioritas penerima PIP. Mengenai pemantauan internal belum maksimal karena terbatasnya ruang pelaksana dan dana langsung masuk ke rekening penerima PIP. Berdasarkan 4 aspek pemantauan dapat diketahui bahwa, ketetapan sasaran penerima PIP sudah tepat sasaran tetapi belum maksimal dalam menyeleksi penerima sesuai dengan prioritas, ketepatan jumlah dana PIP bahwa dana yang disalurkan untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp225.000 dan Rp450.000/peserta didik sesuai SK, ketetapan waktu penyaluran dana PIP

diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran secara bertahap dan mengenai kesesuaian penggunaan dana PIP bahwa orang tua penerima PIP telah memanfaatkan dana untuk membeli keperluan sekolah tetapi sebagian dana untuk kebutuhan diluar sekolah.

2. Mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda terdapat faktor penghambat diantaranya yaitu, faktor komunikasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak sekolah dengan peserta didik sehingga sosialisasi tidak maksimal untuk memberikan informasi kepada peserta didik, kurangnya informasi dari pusat mengenai waktu penyaluran dana yang dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran dan proses pemantauan kurang optimal dalam hal penggunaan dana oleh penerima bantuan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Agar komunikasi berjalan dengan baik antara pihak sekolah dengan penerima bantuan PIP maka sebaiknya pihak sekolah membentuk tim pengaduan dan pemantaan PIP mengenai informasi PIP melalui media whatsapp dan lebih aktif melakukan sosialisasi melalui media social sekolah seperti intagram atau facebook. Serta pihak sekolah aktif melakukan pendataan peserta didik yang memiliki KIP serta mendata sesuai dengan kondisi nyata ekonomi dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan.
2. Sebaiknya untuk waktu penyaluran dana agar lebih transparan dan terjadwal disalurkan bagi setiap sekolah dapat dilakukan setiap pergantian semester agar dana dapat digunakan tepat guna.
3. Sebaiknya pemantaan penggunaan dana PIP dapat dilakukan secara online. Dengan melakukan pembaharuan pada website SIPINTAR untuk penerima PIP agar dapat mengirimkan bukti pembelajaann dan scan cuku rekening dengan tujuan untuk meningkatkan tanggungjawab menggunakan dana dengan baik sehingga tidak salah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Deepublish
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Markindog Grafika

Dokumen-dokumen

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Persesjen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif

Rakor Teknis Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2020

Sumber Internet

Lusiana, Lidia. “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)”. *Jurnal Administrasi Negara* (Online), Volume 6, Nomor 1, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%0020LIDYA%20\(01-17-18-07-33-51\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%0020LIDYA%20(01-17-18-07-33-51).pdf) (diakses pada 9 Maret 2021).

Noorlaila, Feida. 2020. *Teori-Teori Belajar Dalam Pendidikan*. EDU Publisher, https://www.google.co.id/books/edition/TEORI_TEORI_BELAJAR_DALAM_PENDIDIKAN/pInUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 (diakses pada 30 Juni 2021)

Rakista, Putri Mutiara. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)”. *Jurnal Administrasi Negara* (Online), Volume 8 Nomor 2, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2774/1602> (diakses pada 27 Maret 2021).

Saraswati, Lilis Novia. “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”. *Jurnal Administrasi Negara* (Online), Volume 5, Nomor 4, [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL%20\(11-03-17-07-12-36\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL%20(11-03-17-07-12-36).pdf) (diakses pada 9 Maret 2021)